

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara yang sedang berkembang, negara Indonesia menghadapi tantangan pertumbuhan populasi yang signifikan dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, di Indonesia masih dihadapkan pada isu sosial yang belum terselesaikan, yaitu keberadaan anak-anak jalanan (Rachmawati et al., 2021). Persoalan anak jalanan masih membutuhkan penanganan serius dan perhatian lebih mendalam dari berbagai pihak. Hal yang paling mendasar adanya anak jalanan adalah kondisi ekonomi keluarga yang memprihatinkan dan mendorong anak-anak untuk mencari nafkah di jalan. Selain itu, pengaruh lingkungan sekitar juga berperan besar dalam membentuk keputusan seorang anak untuk memilih kehidupan jalanan.

Berdasarkan data yang dirilis *World Population Review* tahun 2023, Indonesia menduduki posisi keempat dalam daftar negara dengan jumlah populasi terbesar di dunia. Data UNICEF mengungkapkan bahwa dari total penduduk Indonesia, satu banding tiga di antaranya merupakan populasi anak-anak dengan uraian jumlah sebagai berikut :

Tabel 1 Jumlah anak di Indonesia (dalam juta)

Kelompok Umur	2023	2022	2021	2020	2019
0-4	22.511	22.094	22.045	22.072	23.064
5-9	22.000	22.013	22.025	22.094	23.974
10-14	22.063	22.088	22.115	22.195	23.057
15-19	22.134	22.163	22.200	22.312	22.294

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Jika dilihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa rentang usia 5-9 tahun mendominasi populasi anak pada periode 2019-2020. Pola ini bergeser pada tahun 2021-2023, di mana kelompok usia 0-4 tahun mencatatkan jumlah tertinggi. Selama kurun waktu 2019-2023, statistik populasi anak Indonesia menunjukkan dinamika pertumbuhan yang mengalami kenaikan dan penurunan. Fenomena ini merupakan konsekuensi alamiah dari proses penambahan usia dan tingkat kelahiran yang terjadi secara berkelanjutan.

Masa anak-anak merupakan periode yang sangat sensitif terhadap berbagai kondisi lingkungan yang tidak mendukung (Mayar et al., 2022). Proses tumbuh kembang dan kelangsungan hidup mereka sangat dipengaruhi oleh peran orang dewasa di lingkungan terdekatnya, yang berdampak pada pembentukan karakter, baik secara positif maupun negatif. Perkembangan kepribadian yang optimal pada anak dapat tercapai jika tersedia ruang yang memadai untuk mengaktualisasikan potensi dirinya. Hanya saja Sebagian anak tidak beruntung dalam hal itu, Mereka yang harusnya bisa sekolah dan menikmati kenyamanan masa kanak-kanak justru harus terjun ke jalan untuk memperbaiki perekonomian mereka (Damayanti & Pertiwi, 2024). Anak-anak yang tidak bisa menikmati hidup layaknya seorang anak pada umumnya, tidak menutup kemungkinan akan terpaksa berada di jalanan untuk membantu keluarga mereka memenuhi kebutuhan hidup.

Individu yang dikategorikan sebagai anak jalanan adalah mereka yang mengalokasikan mayoritas waktunya untuk beraktivitas di ruang publik dan jalan raya. Dalam upaya memperoleh penghasilan, mereka menghabiskan waktu di area-area umum, yang berdampak signifikan pada degradasi mental dan perilaku

karena ketiadaan orientasi hidup yang jelas (Umam, 2022). Dalam penelitian Purwanti (2022) kondisi kehidupan mereka dapat dijelaskan melalui tiga karakteristik utama: terpinggirkan, berisiko tinggi, dan tereksplotasi. Status terpinggirkan tercermin dari ketidakjelasan jenjang karier dan prospek masa depan dalam pekerjaan mereka. Aspek risiko tinggi muncul dari ketidakteraturan waktu bekerja, sedangkan kondisi tereksplotasi tergambar dari minimnya daya tawar mereka dalam hubungan sosial dan ekonomi (Permatasari & Nawangsari, 2022).

Dalam upaya bertahan hidup dan mendapatkan pengakuan, anak-anak yang hidup di jalanan mengembangkan pola perilaku dan budaya tersendiri yang seringkali berlawanan dengan nilai-nilai umum masyarakat, sekaligus memperkuat ikatan di antara mereka. Dalam penelitian milik Lestari & Huda (2021) ditemukan bahwa pandangan masyarakat terhadap kelompok ini cenderung negatif, dengan melabelinya sebagai bentuk perilaku menyimpang. Stigma yang melekat pada mereka mencakup anggapan sebagai pelaku kriminal, pengangguran masa depan, dan bahkan objek eksploitasi tindak kejahatan. Salah satu Tindakan yang dilakukan oleh anak jalanan yang meresahkan warga juga termuat pada kutipan berita Detik (2023):

“Kediri - Belasan pengamen, anak jalanan dan gelandangan terjaring razia petugas gabungan di beberapa titik Kabupaten Kediri. Petugas gabungan itu terdiri dari Satpol PP, polisi dan TNI. Mereka ditangkap di sejumlah titik. Meliputi Simpang Lima Gumul, Simpang Empat Bogo Plemahan, Simpang Empat Papar dan Simpang Empat Pare. Razia ini digelar untuk menciptakan rasa aman dan ketertiban. Pasalnya, banyak keluhan masyarakat yang merasa terganggu atas perbuatan mereka yang meminta dan mengamen secara kasar. Bahkan hingga menggedor body kendaraan.”
(<https://www.detik.com/jatim/berita/d-6778285/meresahkan-belasan-pengamen-dan-anak-jalanan-di-kediri-diamankan> diakses pada tanggal 25 November 2024 pukul 21.45 WIB)

Perlu disadari bahwa perilaku yang dipandang menyimpang pada anak jalanan sesungguhnya merupakan konsekuensi dari kondisi sosial ekonomi yang tidak menguntungkan (Gani et al., 2022), dimana mereka menghadapi realitas kehidupan yang sangat berbeda dibandingkan dengan anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan normal.

Anak-anak yang hidup di jalanan termasuk dalam kelompok masyarakat yang sangat rentan mengalami berbagai tindakan diskriminatif dan ketidaksetaraan dalam kehidupan sosial. Minimnya akses terhadap fasilitas pendidikan, keterbatasan mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, serta kurangnya perlindungan menjadi tantangan besar yang mereka hadapi sehari-hari. Situasi ini semakin memprihatinkan bagi anak-anak perempuan yang hidup di jalanan, karena mereka memiliki risiko lebih tinggi menjadi korban kekerasan seksual (Cahyadi, 2024). Hal ini dibuktikan dengan adanya kutipan berita terkait anak jalanan yang mengalami kekerasan seksual juga termuat pada kutipan berita Harian Jogja (2024):

“Sleman - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sleman mencatat ratusan anak menjadi korban kekerasan di Sleman. Kepala Dinas P3AP2KB Sleman, Wildan Solichin mengungkapkan total ada 164 kasus kekerasan terhadap pada anak hingga November 2024. Wildan mengatakan ratusan korban itu tidak semuanya menjadi korban kekerasan seksual. Angka 164 tadi mencakup anak yang menjadi korban kekerasan fisik, kekerasan seksual maupun terkait dengan kekerasan jalanan. "Kami ada 164 kasus yang kami dampingi, 164 itu memang tidak semuanya kasus pelecehan seksual. Jadi ada yang kasus kekerasan melukai fisik," ujar Wildan, Kamis (5/12/2024).” (<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/12/05/512/1197104/pembkab-sleman-catat-ratusan-anak-jadi-korban-kekerasan-sepanjang-tahun-ini> diakses pada tanggal 3 Desember 2024 pukul 18.10 WIB)

Ketimpangan berbasis gender masih menjadi masalah serius yang dihadapi anak-anak jalanan, dengan penelitian Umam (2022) mengungkapkan anak perempuan menghadapi ancaman lebih besar untuk menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual. Masalah ini diperparah dengan terbatasnya akses mereka terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi dibanding rekan laki-laki (Nahdiana et al., 2023). Diperlukan tindakan tegas untuk menghapuskan kesenjangan gender melalui pendekatan menyeluruh yang mempertimbangkan perbedaan kebutuhan antara anak laki-laki dan Perempuan (Qanitha et al., 2024). Upaya ini membutuhkan kepedulian masyarakat dan peran aktif organisasi di bidang kesetaraan gender, dengan program pemberdayaan responsif gender yang dievaluasi berkala (Novitasari & Mursyidah, 2024).

Munculnya anak jalanan disebabkan oleh beragam faktor kompleks yang mendorong mereka menempuh kehidupan di jalanan. Tekanan ekonomi keluarga, konflik dalam rumah tangga, dan permasalahan personal antara anak dan orang tua menjadi pendorong utama yang memaksa anak-anak mencari penghidupan mandiri di luar rumah. Menurut Sudrajat dalam penelitian Hertanto et al. (2019) anak jalanan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama: kelompok anak yang memiliki potensi besar menjadi anak jalanan, kelompok anak yang mencari nafkah di jalanan namun masih memiliki tempat tinggal, serta kelompok anak yang menjadikan jalanan sebagai tempat tinggal dan menghabiskan sebagian besar waktu mereka di sana.

Kondisi menjadi anak jalanan bukanlah sesuatu yang dicita-citakan, namun merupakan situasi yang terpaksa mereka hadapi akibat berbagai faktor

yang memaksa mereka hidup di jalanan (Irwani et al., 2023). Mereka menghadapi berbagai kesulitan, termasuk risiko kekerasan dan tantangan bertahan hidup, dengan pola interaksi yang bervariasi dengan sebagian hanya meluangkan waktu di sana, sementara lainnya sepenuhnya bergantung pada aktivitas jalanan. Meskipun berbagai kebijakan telah diimplementasikan, hasilnya belum menunjukkan perubahan signifikan, bahkan populasi anak jalanan terus meningkat dengan kecenderungan mengarah pada aktivitas kriminal, dan mayoritas hidup tanpa arah yang jelas, hanya berfokus pada kebutuhan jangka pendek tanpa kesempatan mengembangkan potensi diri (Prasiska et al., 2021).

Eksistensi anak jalanan di Indonesia telah menjadi problematika sosial yang kompleks, dengan salah satu manifestasinya adalah eksploitasi tenaga kerja anak yang kini meluas di luar ranah domestik (Putri, 2022). Meskipun pemerintah telah mengambil berbagai langkah perlindungan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, upaya tersebut belum mampu menjamin terpenuhinya hak anak jalanan untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Kondisi di lapangan justru menunjukkan bahwa mereka masih terus mengalami marginalisasi dalam berbagai aspek kehidupan (Sandora, 2020). Desakan ekonomi yang mendorong keluarga mengirim anak-anak ke wilayah perkotaan sebagai pencari nafkah, diperparah dengan keterbatasan lapangan pekerjaan legal yang memaksa mereka terlibat dalam pekerjaan berisiko tinggi. Situasi ini menuntut peningkatan peran aktif berbagai elemen masyarakat, termasuk instansi pemerintah, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, dan pihak swasta dalam memberikan perlindungan yang efektif bagi anak-anak jalanan.

Berdasarkan catatan data yang dikeluarkan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, jumlah anak yang hidup di jalanan terdistribusi dengan data sebagai berikut:

Tabel 2 jumlah anak jalanan Provinsi Jawa Timur

No.	Kab/Kota	2023
1.	Pacitan	10
2.	Ponorogo	44
3.	Trenggalek	15
4.	Tulungagung	11
5.	Blitar	20
6.	Kediri	21
7.	Malang	35
8.	Lumajang	68
9.	Jember	53
10.	Banyuwangi	10
11.	Bondowoso	31
12.	Situbondo	20
13.	Probolinggo	41
14.	Pasuruan	33
15.	Sidoarjo	90
16.	Mojokerto	24
17.	Jombang	16
18.	Nganjuk	17
19.	Madiun	18
20.	Magetan	18
21.	Ngawi	6
22.	Bojonegoro	43
23.	Tuban	15
24.	Lamongan	46
25.	Gresik	24
26.	Bangkalan	27
27.	Sampang	36
28.	Pamekasan	26
29.	Sumenep	32
30.	Blitar	5

No.	Kab/Kota	2023
31.	Malang	38
32.	Probolinggo	9
33.	Pasuruan	6
34.	Mojokerto	5
35.	Madiun	9
36.	Surabaya	66
37.	Batu	13
38.	Kediri	14
Jumlah		1015

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, 2023

Berdasarkan pencatatan terakhir pada tahun 2023, Dinas Sosial Jawa Timur telah melakukan terobosan baru dalam mendata populasi anak jalanan yang memiliki karakteristik sangat dinamis. Hal ini di perhatikan dengan perpindahan anak jalanan yang sering berpindah antar wilayah kabupaten/kota.

Tabel 3 Jumlah Penduduk Di Kota Surabaya Per Tahun

Tahun	Jumlah Penduduk
2021	2.880.284 juta jiwa
2022	2.887.223 juta jiwa
2023	3.009.286 juta jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2024

Berdasarkan data pada Tabel diatas, terlihat bahwa sebagai kota dengan populasi terbesar kedua di Indonesia, jumlah penduduk Surabaya terus mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan terbesar terjadi antara tahun 2022 ke 2023 dengan penambahan lebih dari 122.000 jiwa (BPS, 2024). Pertumbuhan penduduk yang begitu tinggi di Kota Surabaya mengakibatkan kepadatan populasi, Keadaan ini diperburuk dengan kondisi perekonomian masyarakat karena keterbatasan kesempatan kerja, sehingga mendorong meningkatnya angka kemiskinan. Penanganan masalah anak jalanan di Kota

Surabaya memerlukan keterlibatan berbagai pihak untuk mencapai hasil yang optimal. Melalui pembaruan kebijakan dari Perda No. 6 Tahun 2011 menjadi Perda No. 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, kota ini memperkuat komitmennya dalam menjamin hak kesejahteraan anak terlepas dari kondisi ekonomi orang tua. Tabel berikut menunjukkan jumlah anak jalanan di Surabaya:



Gambar 1 Jumlah anak jalanan Kota Surabaya

Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya, 2024

Berdasarkan grafik yang menunjukkan fluktuasi jumlah anak jalanan di Kota Surabaya dari tahun 2019-2023, terlihat penurunan drastis pada tahun 2021 menjadi 34 anak, kemudian mengalami kenaikan kembali hingga 57 anak pada tahun 2022, dan kembali turun menjadi 35 anak pada tahun 2023. Kondisi ini terjadi karena mobilitas tinggi dan jumlah yang tidak tetap dari anak-anak yang hidup di jalanan. Meskipun kehadiran mereka sering menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat, Surabaya telah mencatat pengurangan jumlah anak jalanan dalam beberapa tahun terakhir berkat upaya Dinas Sosial.

Wonokromo memiliki ciri khas dengan adanya stasiun kereta, terminal bus, dan pasar tradisional yang ramai, serta rumah-rumah tidak teratur di sepanjang rel kereta api. Stasiun Wonokromo dan Terminal Joyoboyo yang berdekatan membuat daerah ini selalu ramai, sehingga menjadi tempat bagi anak

jalanan untuk mencari uang. Menurut Sriyana (2024) perpindahan penduduk yang tidak teratur telah menyebabkan banyak rumah tidak resmi di daerah ini, di mana banyak keluarga hidup dalam keadaan yang sulit. Kawasan Wonokromo diidentifikasi sebagai area yang memerlukan perhatian paling serius karena kompleksitas permasalahan yang dihadapi anak-anak di wilayah tersebut. Pemilihan bantaran rel kereta api Wonokromo sebagai lokasi fokus penelitian didasarkan pada tingginya konsentrasi anak jalanan di area tersebut, dengan jumlah sekitar 52 anak binaan yang secara rutin mengikuti program pendampingan. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4 Jumlah Anak Jalanan Binaan Komunitas WEPOSE Surabaya

Titik	Jumlah Anak Jalanan Binaan Titik Wonokromo
Wonokromo	52

Sumber: Komunitas WEPOSE, 2024

Berdasarkan observasi, terdapat beberapa permasalahan utama. Pertama, dari segi pergaulan, karena mereka tinggal di pinggiran rel dengan banyak pendatang yang tidak semuanya asli Surabaya, pola pergaulan mereka berbeda dibandingkan anak-anak di kampung lainnya. Kedua, tingkat agresivitas mereka cenderung lebih tinggi, kemungkinan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar termasuk kebiasaan berteriak saat berkomunikasi akibat kebisingan kereta yang sering lewat. Ketiga, pola pengasuhan orang tua yang cenderung keras terhadap anak-anak, mungkin disebabkan oleh tekanan ekonomi yang mengharuskan anak-anak membantu orang tua berjualan dan menjaga adik-adik mereka. Hal ini menyebabkan mereka tidak bersekolah atau putus sekolah. Tidak hanya itu, keluarga di area ini umumnya memiliki banyak anak, sekitar 2 hingga 3 orang

bahkan lebih, Selain itu, orang tua di kawasan ini tampak kurang memberikan perhatian pada aspek pendidikan anak-anak mereka, meskipun pendidikan merupakan faktor penting dalam perkembangan anak, mereka cenderung bersikap santai dan kurang memiliki kesadaran tentang pentingnya pendidikan.

Generasi penerus bangsa, khususnya anak-anak Indonesia perlu mendapatkan standar kehidupan berkualitas dengan terpenuhinya kebutuhan mendasar seperti kesejahteraan fisik, pembentukan karakter, proses pembelajaran, dan kegiatan bermain. Penelitian Ladaria et al., (2020) menunjukkan bahwa kemajuan sebuah bangsa dapat diukur melalui tingkat pendidikan dan kapasitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Sedangkan dalam penelitian Susiani & Abadih (2021) menegaskan bahwa tingkat kemajuan suatu negara tercermin dari standar dan kualitas sistem pendidikan yang diterapkan. Pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mengurangi kemiskinan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran sosial dan diri. Sayangnya, masih banyak masyarakat di negara berkembang seperti Indonesia yang belum menyadari arti penting pendidikan karena masih bergulat dengan persoalan kesejahteraan dan keterbelakangan.

Pendekatan pendidikan yang diterapkan WEPOSE meliputi program literasi dasar untuk membantu anak-anak yang sebelumnya tidak bisa membaca dan berhitung menjadi memiliki kemampuan dasar tersebut, pendidikan karakter yang fokus pada pengembangan kepercayaan diri dan pengendalian emosi, serta pendampingan belajar. Komunitas ini berfokus pada pendidikan sebagai strategi utama pemberdayaan karena menyadari bahwa anak-anak yang dibina berada pada rentang usia 5-15 tahun, yang merupakan usia kritis masa sekolah dimana

perkembangan kognitif, sosial, dan emosional sedang berlangsung pesat. Komunitas ini juga memiliki misi utama mengembangkan kepedulian sosial dan memastikan terpenuhinya hak-hak fundamental anak jalanan serta kelompok marjinal yang sering kekurangan akses terhadap pendidikan.



Gambar 2 Kegiatan Belajar Bareng Kakak Asuh

Sumber: Komunitas WEPOSE, 2024

Gambar diatas adalah kegiatan rutin komunitas yaitu aktivitas pembelajaran "Belajar Bareng Kakak Asuh" dan "Belajar Mandiri Wonokromo" yang diselenggarakan setiap Sabtu sore. WEPOSE menjalankan berbagai program rutin untuk memberdayakan anak jalanan, mulai dari pendampingan belajar interaktif mingguan hingga sesi pelatihan pengendalian emosi setiap Minggu untuk mengurangi perilaku agresif dan pengembangan taman baca melengkapi pendekatan komprehensif dalam upaya membimbing anak-anak mengembangkan kemampuan literasi dan kepercayaan diri. Komunitas ini juga mengadakan program edukasi bersama orang tua, layanan kesehatan gratis setiap 2-3 bulan sekali, dan program beasiswa rutin setiap semester. Kegiatan tahunan seperti "Suara Arek Suroboyo", Festival Anak Surabaya. berdasarkan informasi yang diperoleh penulis saat melakukan wawancara pendahuluan *founder* WEPOSE, pada 16 desember 2024:

“Tantangan terbesar kami adalah belum adanya sinergi dengan Dinsos. Mereka punya target zero anak jalanan, sedangkan kita paham bahwa itu sulit dicapai dalam waktu singkat. Banyak faktor yang membuat anak-anak ini harus ke jalan. Pendekatan kami lebih ke pendidikan dan pemberdayaan bertahap. Kami tidak bisa langsung melarang mereka bekerja karena banyak yang harus membantu ekonomi keluarga. Yang bisa kami lakukan adalah memastikan mereka tetap bisa belajar. Sebenarnya visi kami sama dengan Dinsos sama-sama ingin anak-anak ini punya kehidupan lebih baik. Tapi memang cara pendekatan kami berbeda. Kami berharap ke depan bisa ada jembatan komunikasi yang lebih baik”

Berdasarkan wawancara pendahuluan, WEPOSE telah mengembangkan beragam program pemberdayaan melalui keterlibatan dengan berbagai pihak, namun menghadapi tantangan akibat perbedaan pendekatan dengan Dinas Sosial Kota Surabaya yang bertujuan menghentikan sepenuhnya aktivitas anak jalanan. Metode pembelajaran inovatif WEPOSE yang interaktif dan dikembangkan melalui observasi langsung telah berhasil menarik minat anak jalanan, meskipun komunitas ini masih membutuhkan dukungan finansial dan SDM kompeten untuk menjamin keberlanjutan dan memperluas jangkauan program pemberdayaan di wilayah Surabaya. Meskipun menghadapi tantangan tersebut, WEPOSE berhasil menjalin keterlibatan sektor swasta melalui program CSR (Corporate Social Responsibility) dari perusahaan seperti Bon Cabe dan Broman yang memberikan dukungan sponsorship untuk berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan.

Upaya pemberdayaan yang diinisiasi oleh komunitas WEPOSE telah berhasil meningkatkan antusiasme anak jalanan untuk memperbaiki kualitas hidup melalui jalur pendidikan, tercermin dari tingkat keterlibatan mereka dalam berbagai program. Namun, untuk memastikan keberlanjutan program ini, diperlukan dorongan motivasi yang konsisten agar anak-anak jalanan tetap aktif

berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Seperti yang disampaikan langsung dalam wawancara oleh *founder* WEPOSE, pada 16 Desember 2024 sebagai berikut:

“Tantangan terbesar adalah mempertahankan motivasi anak-anak. Mereka punya beban ekonomi keluarga, jadi kita harus selalu memberikan semangat. Kami juga melihat perubahan signifikan. Beberapa anak yang dulu jarang hadir, sekarang rajin mengikuti kegiatan belajar dan pelatihan. Fokus kami adalah membangun kepercayaan diri mereka. Pendidikan bukan sekadar transfer ilmu, tapi membangun mimpi. Kadang mereka lelah, jenuh. Tapi kami selalu coba buat metode belajar yang menyenangkan.”

Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa masalah yang memerlukan perhatian mendalam, oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana upaya pemberdayaan yang dilakukan dalam menangani permasalahan kompleks anak jalanan tersebut.

Sesuai dengan uraian latar belakang diatas, penelitian ini menggunakan kerangka teori strategi pemberdayaan masyarakat "5P" dari Suharto (Mardikanto & Soebiato, 2020) yang mencakup Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan untuk menganalisis strategi Komunitas WEPOSE dalam memberdayakan anak jalanan di Surabaya. Teori ini dipilih karena kemampuannya menganalisis tidak hanya proses pemberdayaan langsung tetapi juga keberlanjutan program dan perlindungan terhadap kelompok sasaran yang rentan. Kerangka sistematis ini juga membantu menganalisis tantangan implementasi program, termasuk kesenjangan pendekatan dengan Dinas Sosial Kota Surabaya, sehingga dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang upaya Komunitas WEPOSE dalam meningkatkan kualitas hidup anak-anak jalanan.

Pemungkinan pada program WEPOSE terlihat dari upaya menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan potensi anak jalanan melalui pendampingan pendidikan. Perlindungan diimplementasikan melalui kerjasama dengan berbagai pihak untuk menjamin keamanan anak jalanan dari eksploitasi. Penyokongan diwujudkan dalam bentuk pendampingan berkelanjutan dan akses terhadap layanan pendidikan. Pemeliharaan dilakukan melalui monitoring program dan evaluasi berkala untuk memastikan keberlanjutan dampak positif. Berdasarkan uraian tersebut penulis mengangkat judul **“Strategi Pemberdayaan Anak Jalanan Bantaran Rel Wonokromo Melalui Pendampingan Pendidikan Oleh Komunitas WEPOSE Kota Surabaya”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana strategi pemberdayaan anak jalanan oleh komunitas WEPOSE di Kota Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, dengan tujuan utama menganalisis dan menjelaskan secara rinci tentang strategi pemberdayaan anak jalanan oleh komunitas WEPOSE di Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Masyarakat

WEPOSE Surabaya merupakan sebuah komunitas yang bergerak dalam pengawasan dan pendampingan anak jalanan di wilayah perkotaan. Mereka berupaya meningkatkan kesadaran publik tentang cara-cara efektif untuk

membantu anak-anak tersebut. Keberhasilan program ini tidak terlepas dari dukungan aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan pemberdayaan yang dilakukan.

1.4.2 Bagi Kota Surabaya

Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan diskusi, evaluasi, dan alat ukur keberhasilan dalam menjalankan berbagai inisiatif pemberdayaan untuk anak-anak jalanan di wilayah Surabaya.

1.4.3 Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang bermanfaat bagi *civitas academica* di lingkungan Program Studi Administrasi Publik, khususnya para mahasiswa dan staf pengajar di Fakultas Ilmu Sosial Budaya dan Ilmu Politik UPN Veteran Jawa Timur. Kajian ini dapat menjadi sumber pembelajaran dan landasan teoretis untuk pengembangan penelitian selanjutnya dalam bidang pemberdayaan Masyarakat.